

DESAIN STRATEGIS ANTISIPASI PERATURAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN PERGURUAN TINGGI PARIWISATA DI BAWAH KEMENPAREKRAF

Surayyal Hizmi¹, Herry Rachmat Widjaja¹, Farid Said², Jujuk Ferdianto¹, Rizda Batubara¹

¹Politeknik Pariwisata Lombok, Indonesia

²Politeknik Pariwisata Makassar, Indonesia

E-mail: surayal@ppl.ac.id, herry.rachmat@ppl.ac.id, farglobal@ymail.com,
jujuk.ferdianto@ppl.ac.id, rizda@ppl.ac.id

Abstrak

Tujuan penelitian: Keberadaan dari Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) menjadi salah satu permasalahan yang marak dibicarakan dikarenakan temuan dari kajian KPK terhadap penyelenggaraan pendidikan termasuk pada PTKL di bawah Kemenparekraf. Oleh karenanya perlu adanya desain strategis dalam mengantisipasi kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan Perguruan Tinggi Pariwisata di bawah Kemenparekraf. Metode penelitian: Penelitian bersifat kualitatif dengan menggunakan pendekatan Participatory Action Research (PAR). Dimana sumber data primer berasal dari hasil FGD dari beberapa PTKL di Indonesia. Hasil dan pembahasan: Hasil penelitian ini merujuk pada desain strategis yang melibatkan dua aspek utama yaitu pada kelompok PTKL yang harus selaras dengan kebutuhan pada kelompok kedua yakni yang industri, pemerintah serta instansi terkait di bidang pariwisata. Aplikasi: Implementasi model yang disusun dapat diterapkan dalam memperoleh manfaat maksimal dalam mengembangkan SDM yang kompeten. Oleh karenanya, kerjasama antar PTKL dan Kemendikbud Ristek perlu dilakukan serta langkah-langkah yang diambil oleh PTKL di bawah Kemenparekraf Bersama kemendikbud Ristek adalah melakukan penataan dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi KPK.

Kata kunci: PTKL, PAR, Kemenparekraf.

PENDAHULUAN

Berkembangnya pariwisata menjadi salah satu sektor utama dalam mendukung perekonomian Indonesia menjadi perhatian dari pemerintah. Hal ini dikarenakan sektor pariwisata menjadi salah satu sektor berkelanjutan yang dapat menjadi alternative solusi pendapatan negara selain berasal dari sumber daya alam yang tidak dapat terbaharukan seperti minyak bumi dan gas alam. Oleh karenanya, demi mendorong perkembangan industri pariwisata, maka penyediaan Sumber Daya Manusia yang kompeten di bidang kepariwisataan menjadi salah satu aspek yang diperhatikan.

Meskipun Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan telah memiliki perguruan tinggi di bidang kepariwisataan. Keberadaan dari perguruan tinggi vokasi yang terfokus pada keterampilan, pengetahuan dan kompetensi SDM yang terfokus pada bidang tertentu dan siap kerja dalam memenuhi kebutuhan industri sangatlah dibutuhkan. Oleh karenanya, Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Kemenparekraf) mendirikan beberapa Politeknik Pariwisata yang merupakan perguruan tinggi vokasi dengan penyediaan kurikulum yang telah terintegrasi dengan kebutuhan industri. Dalam perkembangannya, Politeknik Pariwisata telah mengalami beberapa kali perubahan nama mulai dari yang awalnya berupa institusi yang menyediakan diklat kepariwisataan sampai dengan perguruan tinggi vokasi. Saat ini terdapat 6 Politeknik Pariwisata yang tersebar di seluruh Indonesia, yakni Politeknik Pariwisata Medan, Palembang, Makassar, NHI Bandung, Bali dan Politeknik Pariwisata Lombok. Keenam Politeknik Pariwisata ini telah mencetak SDM yang tidak hanya bekerja di level nasional melainkan pula di level internasional. Dengan adanya keberaan Politeknik Pariwisata ini,

menjadi salah satu asset dalam perkembangan SDM Kepariwisata yang dapat bersaing dan memenuhi kebutuhan industri.

Di sisi lain, keberadaan dari Politeknik Pariwisata ini menjadi perhatian dan pertimbangan dari pemerintah. Berdasarkan kajian yang telah dilakukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), terdapat peralihan peranan dan fungsi dari Perguruan Tinggi yang berada di bawah Kementerian Lain (PTKL). Dimana, PTKL tersebut awalnya didirikan untuk memenuhi kebutuhan pegawai hanya pada instansi pemerintahan yang bersangkutan, namun hal ini bergeser dan berkembang dalam penyelenggaraan pendidikan yang tidak bersifat kedinasan. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektornya selain itu penyelenggaraan PTKL juga disebutkan sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat.

Konflik lain muncul akibat adanya kepentingan antar lembaga yang menyebabkan perubahan kebijakan yang tidak profesional yang kemudian akan menimbulkan hambatan dan berdampak pada penurunan kualitas SDM, khususnya jika kebijakan yang ditetapkan tidak mempertimbangkan 8 prinsip Tata Kelola Pemerintahan, yang menurut UNDP terdiri dari: partisipasi, kepastian hukum, transparansi, tanggung jawab, berorientasi pada kesepakatan, keadilan, efektifitas dan efisiensi, akuntabilitas dan visi strategik (United Nation Development Program (UNDP), 2020). Mengacu pada aspek ke-8 dari prinsip Tata Kelola Pemerintah, yakni visi strategik dan mengacu pada kondisi riil yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di bawah Kemenparekraf, maka penelitian terfokus pada rancangan desain strategik dalam mengantisipasi peraturan pemerintah dalam penyelenggaraan pendidikan kepariwisataan di bawah Kemenparekraf.

METODE

Penelitian ini dilakukan selama 6 bulan dengan pendekatan kualitatif model Participatory Action Research (PAR). Selain itu, demi mempermudah desain dalam implementasinya, maka peneliti melakukan kombinasi dengan studi fenomenologi yang terjadi di beberapa subjek penelitian.

1. Pengumpulan data

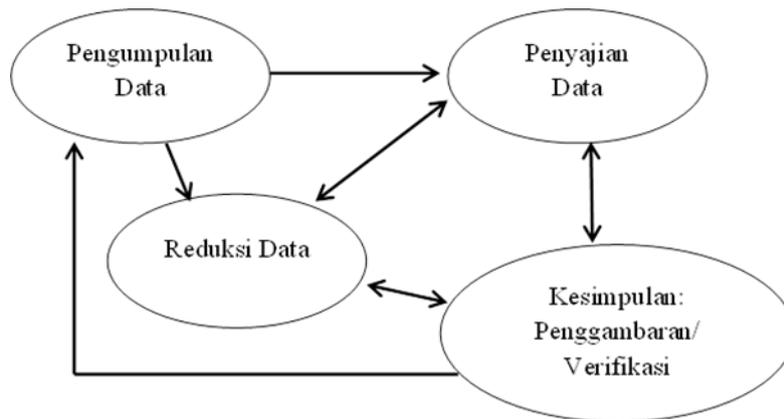
Adapun tahapan pada penelitian ini antara lain:

- a. Simulasi rancangan perubahan yang terjadi: Untuk dapat merancang scenario perubahan yang akan terjadi, peneliti mengumpulkan data berdasarkan dari kajian KPK terkait PTKL, serta didukung melalui informasi dari berbagai penyelenggara PTKL yakni Kementerian Pertanian, Perindustrian, Perhubungan dan Pertahanan terkait kondisi yang terjadi dalam penyelenggaraan pendidikan vokasi di bidang tersebut maupun strategi yang dilakukan dalam mengantisipasi kebijakan yang akan dikeluarkan.
- b. Pengamatan proses dan konsekuensi perubahan: proses ini dilakukan dengan cara melaksanakan FGD dan menyebarkan angket terkait dengan model yang telah disusun, dimana sasaran dari angket tersebut adalah Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) dan Asosiasi Kepariwisataan.
- c. Kajian proses: setelah data terkumpul maka peneliti melakukan benchmarking kepada beberapak PTKL yang memiliki permasalahan sejenis untuk meninjau strategi yang dilakukan khususnya terkait dengan tata kelola manajemen SDM, program pembelajaran, dan pengelalolaam anggaran pelaksanaan pendidikan vokasi di perguruan tinggi tersebut.
- d. Tahap perancangan ulang: berdasarkan data yang telah diperoleh sebelumnya, maka rancangan awal yang telah disusun kemudian dievaluasi dan disesuaikan dengan temuan yang ada dari ketiga tahapan sebelumnya.
- e. Tahap penerapan dan pengamatan kembali: Pada tahapan ini peneliti melakukan tinjauan kembali terkait rancangan yang telah disusun melalui pelaksanaan FGD guna mengevaluasi model yang telah disusun sebelumnya. Adapun narasumber dari FGD

ini adalah berasal dari OPD, Asosiasi Usaha bidang Kepariwisata serta perwakilan dari PTKL yang telah diundang pada tahap sebelumnya.

2. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan berpedoman pada Miles dan Humberman (2007). Data yang telah dikumpulkan berupa recording ditranscript seluruhnya ke dalam Bahasa Indonesia. Kemudian hasil dari transcript tersebut dikelompokkan sesuai dengan temanya masing-masing. Untuk memperoleh data spesifik, maka data yang telah dikelompokkan ini kembali diseleksi dan seluruhnya ditampikan dalam bentuk tabel/ diagram yang kemudian hasil dari data yang telah dikelompokkan tersebut dapat dengan mudah dijadikan dasar dalam penarikan kesimpulan/verifikasi (Gambar 1).



Gambar 1. Analisa Data Model Interaktif diadopsi dari Miles dan Huberman (2007: 20)

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Harmonisasi Pelaksanaan Tata Kelola Perguruan Tinggi Bidang Pariwisata

a. Pendidikan Vokasi di Kemdikbud dan Ristek

Akselerasi peningkatan kualitas pendidikan vokasi perlu dilakukan dengan pertimbangan aspek yang dapat meningkatkan kualitas sekolah vokasi sekaligus dapat meningkatkan daya saing tenaga kerja khususnya pada jenjang operasional pelaksana, namun disayangkan, data BPS menunjukkan masyarakat berpendidikan SMK menyumbang angka pengangguran tertinggi sebesar 11,2 persen per Agustus 2018 (BPS, 2019). Data di atas sejalan dengan penelitian sebelumnya bahwa perguruan tinggi vokasi memiliki fungsi yang sama dengan perguruan tinggi non-vokasi sebagai penyalur ilmu untuk masyarakat (Herawati & Ulum, 2020).

Perguruan Tinggi vokasi yang unggul mampu berupaya melakukan langkah-langkah kongkrit dalam penguatan konsep link and match yang belum mampu diterapkan sepenuhnya di perguruan tinggi non-vokasi. Data perguruan tinggi sebagai acuan perbandingan antara jumlah Politeknik dengan Universitas di Indonesia dikutip dari sumber Iktisar data pendidikan 2018 di lingkungan Kemendikbud Ristek yakni: Politeknik 199 terdiri dari 43 Negeri dan 156 Swasta, jumlah mahasiswa 239.282 terdiri dari 156.461 Negeri dan 89.821 Swasta. Dibandingkan dengan data Universitas 563 terdiri dari 63 Negeri dan 500 Swasta, jumlah mahasiswa 1.038.811 terdiri dari 481.611 dan 557.200. Data ini menunjukkan bahwa perbandingan perguruan tinggi vokasi dan perguruan tinggi non-vokasi sangat jauh berbeda begitu pula jumlah mahasiswanya. Jika diasumsikan, 40 persen luaran universitas masuk ke dunia kerja dengan minim keterampilan, maka akan menghasilkan produk high cost.

Hasil riset McKinsley Global Institute (MGI) memaparkan bahwa sampai dengan tahun 2030 Indonesia akan menjadi barometer ekonomi dunia dengan kebutuhan 113 juta tenaga kerja terampil. Sedangkan tenaga kerja terampil yang tersedia baru 57 Juta

(Antara April, 2017). Diperkuat oleh Menaker M. Hanif Dhakiri, selain kekurangan tenaga kerja terampil, mayoritas angkatan kerja Indonesia masih didominasi pendidikan non-vokasi. Sumber daya manusia yang terampil merupakan aset utama bagi perusahaan karena aset SDM merupakan penggerak model pembaruan strategik dan inovasi baik sebagai penelitian laboratorium, melakukan pola rekonstruksi maupun pembaruan keterampilan kompetensi terkhusus keterampilan digital sebagai salah satu tuntut perusahaan di era industri 4.0.

Perguruan Tinggi Kementerian Lain khususnya bidang Kepariwisata sejak 90-an sudah mempersiapkan lembaga pendidikan bidang keahlian tertentu baik untuk memenuhi kebutuhan internal Kementerian Lembaga/Instansi yang bersangkutan maupun industri dengan sumber daya yang sangat memadai guna mencetak sumber daya manusia yang memiliki sikap kerja, keterampilan dan pengetahuan sesuai standar industri baik skala nasional maupun Internasional. Antisipasi dari PTKL sebagai pengelola Perguruan Tinggi cukup menghasilkan buah yang positif dimana luarannya dapat kita lihat sekarang sudah bekerja menduduki level pimpinan menengah keatas diprusahaan didalam maupun luar negeri khususnya bidang Kepariwisata. Harmonisasi eksistensi peran pengelolaan perguruan tinggi dalam membantu Kemendikbud Ristek sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi menjawab tantangan untuk dapat mengisi angkatan kerja terampil yang memiliki kompetensi baik standar nasional maupun standar Internasional yang sudah dipersiapkan oleh masing masing PTKL sesuai program studi keahlian masing masing.

b. Pendidikan Vokasi di Perguruan Tinggi Kementerian Lain (PTKL) (digambarkan dari hasil benchmarking di Poltekes, Unhan, PPP Bogor, STIA LAN, PPI Curug, PKN STAN)

- Politeknik Kesehatan provinsi NTB

Dalam pelaksanaan pendidikan, Politeknik Kesehatan (Poltekes) provinsi NTB yang ada di bawah Kementerian Kesehatan mengedepankan Centre of Excellence/ keunggulan dari perguruan tingginya yakni dalam kajian dan penanganan Stunting sehingga menjadi daya tarik dalam bersaing dengan perguruan tinggi swasta atau perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristekdikti. Hal ini dilakukan untuk menunjukkan kebutuhan dan pentingnya pengadaan pendidikan yang ada di bawah Kementerian Kesehatan yang berbeda dengan pelaksanaan pendidikan kesehatan di bawah naungan Kemendikbudristekdikti. Selain itu, Politekes provinsi NTB lebih menekankan keluarannya/ lulusan yang sudah siap bekerja di pusat pelayanan masyarakat. Dimana dalam program pendidikannya, dalam pelaksanaan Komunitas Kegiatan Mahasiswa (KKM), difokuskan dan dilakukan pada pusat pelayanan masyarakat yakni melalui PUSKESMAS yang ada di seluruh provinsi NTB. Mengacu pada opsi ke-3 dari RPP PTKL untuk bergabung dengan perguruan tinggi di bawah Kemendikbudristekdikti seperti UNRAM, menjadi suatu kendala terkait dengan penerapan kurikulum atau pun pelaksanaan pendidikan yang ada. Hal ini dikarenakan parameter dan regulasi yang berbeda antara kedua perguruan tinggi terkait dengan pendidikan kesehatan, khususnya untuk analis dan program kebidanan.

- Pelaksanaan pembelajaran di Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor menerapkan program praktik dengan komposisi 70% sedangkan teori sebanyak 30%. Dalam penyusunan mata kuliah pada masing-masing program studi, berpedoman pada SKKNI dan disesuaikan dengan kompetensi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan di lapangan yang merupakan kondisi real di bidang pertanian. Seperti halnya PTKL lainnya pelaksanaan dan keberadaan dari PPP Bogor ini didasarkan oleh kebutuhan atas sumber daya manusia yang berkualitas di bidang pertanian sehingga dapat memenuhi target ketahanan pangan nasional melalui program pertanian serta dapat mendukung kualifikasi dan jenjang karir bagi ASN. Demi mengakomodir kedua kebutuhan ini, maka PPP Bogor membuka 2 jalur

penerimaan yakni jalur khusus ASN dan jalur umum. Dengan adanya jalur umum, maka masyarakat dari golongan ekonomi ke bawah yang berasal dari keluarga buruh tani atau pun petani dapat berkesempatan mendapatkan pendidikan yang lebih layak. Terkait dengan keterlibatan Kemendikbudristedikti dalam pelaksanaan pendidikan di PPP Bogor adalah pengembangan kurikulum dan jenjang karir dosen. Dimana Kemendikbudristedikti ikut dalam penyusunan pedoman dan aturan-aturan yang diterapkan dalam system pendidikan di PPP Bandung.

- Seperti halnya PTKL lain, pelaksanaan pendidikan pada PKN STAN berdasarkan dari rasi 70% praktik dan 30% teori yang cakupan luarannya dituangkan dalam RPS sesuai dengan kebutuhan di dunia kerja. Mata kuliah praktikum ditujukan untuk mata kuliah inti, magang, dan sertifikasi bagi lulusan. Beberapa program pendidikan yang dilaksanakan PKM STAN menyesuaikan dengan permintaan atau kebutuhan dari Pemda, yakni melalui program diklat. kelas khusus, latihan atau bimbingan terknis yang mana merupakan BLU dengan penarikan sesuai aturan keuangan negara. Selain program BLU, terdapat pula program pembibitan, dimana pada pola pembibitan bertujuan untuk mendidik calon yang berasal dari SMA, dimana pemerintah daerah memilih calon dari daerahnya masing-masing yang kemudian direkomendasikan untuk mengikuti seleksi masuk PKM STAN. Dalam hal ini pemerintah daerah berperan dalam mengusulkan formasi atau jumlah SDM yang direkomendasikan atau diminta untuk mengikuti perkuliahan di PKM STAN. Setelah usulan diterima, maka PKM STAN menyiapkan pola pendidikan yang sesuai untuk program tersebut.

c. Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM)

- Politeknik Kesehatan provinsi NTB
Terkait dengan jenjang karir, lulusan Poltekes masih menjadi prioritas di beberapa dinas kesehatan atau pun institusi kesehatan lainnya. Dalam pemilihan tenaga kerja, industri di bawah pemerintah maupun swasta lebih memilih lulusan dari Poltekes dibandingkan dari perguruan tinggi swasta. Hal ini tidak terlepas dari keahlian dan pengalaman kerja dari mahasiswa yang sebelumnya telah ditempatkan di beberapa instansi kesehatan atau pelayanan masyarakat. Dalam pemenuhan SDM sendiri, dirasakan Poltekes cukup mengakomodir kebutuhan dunia kerja, hal ini ditunjukkan oleh keberadaan dari Poltekes yang berjumlah 38 tersebar di seluruh provinsi di Indonesia dengan 504 program studi yang dibackup penuh oleh Kementerian Kesehatan. Poltekes di provinsi NTB sendiri, telah memiliki program profesi Nurse, yang mencakup program paket Diploma 4 selama 4 tahun dan profesi selama 1 tahun. Khusus untuk profesi memiliki program studi yang terpisah dengan program studi lainnya. Hal ini demi mengoptimalkan pelaksanaan pembelajaran dan manajerial di dalam program pendidikan tersebut.
- Politeknik Pembangunan Pertanian Bogor
Sebagian besar lulusan dari PPP Bogor telah memiliki pekerjaan, dan khusus ASN memiliki jenjang karir dan kualifikasi yang lebih baik dari sebelumnya. Berdasarkan hasil tracer study, menunjukkan bahwa alumni dapat memperoleh pekerjaan kurang dari 3 tahun setelah mereka lulus dari PPP Bogor. Sementara untuk kualitas dosen, ditinjau dari pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, penelitian terapan dan PKM yang dilakukan berupa pembinaan desa mitra dan pendampingan program Kementerian Pertanian. Banyak dari publikasi yang telah diterbitkan oleh dosen – dosen pada jurnal nasional maupun internasional bereputasi. Selain itu, beberapa modul mata kuliah praktik yang digunakan merupakan hasil pengembangan atau penelitian dosen.

d. Tata Kelola Bidang Akademik dan Umum

- Politeknik Kesehatan provinsi NTB

Terkait dengan tenaga pengajar dan dosen di Poltekes provinsi NTB, dalam pelaksanaannya telah melakukan kesepakatan bersama dengan Kemendikbud ristekdikti yang dituangkan dalam SK alih bina. Dimana dalam pelaksanaan pendidikan dan akreditasi dan SDM dosen menjadi urusan dan tanggung jawab sepenuhnya dari Kemendikbudristekdikti sedangkan operasional pendidikan ditanggung dan diatur oleh Kementerian Kesehatan. Seluruh asset dari poltekes merupakan PMBP dengan pertimbangan kondisi masyarakat sekitar yang berasal dari kalangan ekonomi ke bawah. Poltekes yang ada di bawah kementerian Kesehatan sendiri memiliki asosiasi yang mengakomodir dan menjadi perwakilan dalam mempertahankan kondisi perguruan tinggi yang merupakan penyelenggara pendidikan di luar Kemendikbudristekdikti.

- PKN STAN

Berbeda halnya dengan PPP Bogor maupun PTKL lainnya. Roadmap pengembangan dan tata kelola di PKN STAN difokuskan dalam 3 aspek utama yakni Pengembangan infrastruktur, kurikulum, dan SDM. Hal ini bertujuan untuk menciptakan kualitas SDM yang sesuai dengan standar/ kualifikasi yang dibutuhkan di pemerintahan. Dalam tata kelola perguruan tinggi, PKN STAN bekerja sama dengan PAN RB dalam penyediaan kebutuhan SDM di bidang keuangan yang siap bekerja di unit pemerintahan yang ada.

2. Desain Strategis Perguruan Tinggi Vokasi Bidang Pariwisata

Perkembangan Perguruan Tinggi Vokasi memiliki peranan penting dalam pengembangan SDM yang dapat mendukung pembangunan Indonesia. Lulusan dari Perguruan Tinggi Vokasi dituntut untuk dapat memiliki kompetensi sesuai dengan bidang dan level yang dibutuhkan dalam bekerja di industri baik dalam konteks nasional maupun global. Selain itu, lulusan dari Perguruan Tinggi Vokasi juga dituntut dalam peranannya sebagai “agen pejuang kedaulatan” yang mana memiliki kemampuan entrepreneurial, yakni menjadi “trend centre” dalam menjawab berbagai tantangan yang dihadapi oleh bangsa (Slamet, 2009).

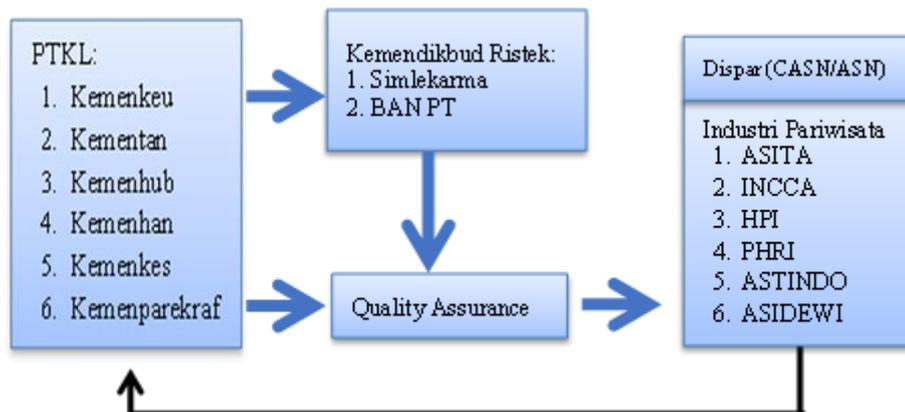
Mengadaptasi kajian yang telah dilakukan oleh Slamet (2009), terdapat beberapa dimensi yang diamati terkait dengan PTKL, yakni:

- a. Pengembangan kualitas dasar yang dimiliki oleh mahasiswa/ peserta didik ditinjau dari kualitas daya pikir, qolbu dan daya fisik, seperti:
 - Peningkatan kualitas daya pikir yakni dalam berpikir analitis, deduktif, ilmiah, induktif, kreatif, lateral, nalar dan sistematis
 - Kualitas daya qolbu terdiri dari tingkat keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki rasa kasih sayang, kesopansantunan, integritas, kejujuran dan kebersihan, respek terhadap orang lain, beradab, bermartabat, bertanggung jawab, toleransi terhadap perbedaan, kedisiplinan, kerajinan, dan sebagainya
 - Peningkatan daya fisik terdiri dari ketahanan, stamina, kesehatan dan keterampilan
- b. Pengembangan kualitas instrumental/ penguasaan/ fungsional dalam ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan olah raga yang meliputi: penguasaan monodisiplin, multidisiplin, interdisiplin, lintas disiplin, serta penguasaan seni yang meliputi seni tari, seni musik, seni kriya, seni suara, seni rupa dan kombinasi.
- c. Memperkuat karakter sebagai bangsa Indonesia yang cinta tanah air dalam 4 pilar kehidupan bangsa Indonesia yakni Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhineka Tunggal Ika.
- d. Menjaga keberlangsungan hidup dan perkembangan dunia melalui wadah-wadah kolektif; menjaga pembangunan melalui konsep keberlangsungan dari aspek lingkungan, ekonomi dan sosio-kultural.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Harris, Stones dan Moore (2006), pembelajaran vokasi berorientasi dalam pelaksanaan praktikum di tempat nyata dalam dunia industri

dinyatakan efektif dan efisien jika menjawab kompetensi yang sesuai dengan kebutuhan nasional.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan terhadap PTKL yang ada di Indonesia, maka peneliti merancang skema sebagai berikut:



Perluasan mandat tersebut berimplikasi pada beberapa aspek, diantaranya: penyesuaian program pendidikan (program studi), sistem kurikulum, pola dan metode pembelajaran, riset yang diselenggarakan, peran dalam masyarakat, sumber daya manusia, sarana dan prasarana. Beberapa aspek dimaksud harus dipersiapkan dengan baik dan menyeluruh oleh penyelenggara pendidikan tinggi vokasi. Ditinjau dari roadmap yang ada pada gambar di atas menekankan bahwa aspek kualitas menjadi pertimbangan utama baik antara Perguruan Tinggi Vokasi pada Kementerian Lain maupun industri, asosiasi maupun pemerintah terkait

SIMPULAN DAN SARAN

Kebijakan yang efisien disusun berdasarkan multi kepentingan menyesuaikan tata kelola PT kementerian lain yang sudah menjalankan Link -Mach dengan industri Pariwisata sebelum lahirnya PTKL. Sehingga langkah langkah yang diambil oleh PTKL dibawah Kemenparekraf Bersama kemendikbud Ristek adalah melakukan penataan dan evaluasi tentang pengelolaan keuangan sesuai rekomendasi KPK.

DAFTAR PUSTAKA

- Dardiri, A. (2011). Diversifikasi kompetensi lulusan pendidikan dan latihan vokasi untuk lebih kompetitif. *Teknologi Dan Kejuruan*, 34(1), 91–104.
- Erlin Damayanti, Mochammad Saleh Soeaidy, H. R. (2011). No Title. *Jurnal Administrasi Publik*, 2(3), 464–470
- Fàbregues, S., Molina-Azorin, J. F., & Feters, M. D. (2021). Virtual Special Issue on “Quality in Mixed Methods Research.” *Journal of Mixed Methods Research*, 15(2), 146–151. <https://doi.org/10.1177/15586898211001974>
- Islamy, I. M. (2007). *Prinsip-Prinsip Perumusan Kebijaksanaan Negara*, Cet. Ke Enambelas, Jakarta: PT. Bumi Aksara
- John W. Creswell. (2013). *Research Design_ Qualitative, Quantitative, and Mixed Method Approaches-SAGE Publications (2013).pdf* (p. 273).
- Keban, Y. T. (2014). *Enam Dimensi Strategis Administrasi Publik, Konsep, Teori, dan Isu*, Yogyakarta, Gava Media.

- Kementrian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi. (2016). Penyusunan Kurikulum Pendidikan Vokasi. 166.
- Peraturan Presiden RI No : 64 Tahun 2014 Tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Kepariwisataaan
- Peraturan Pemerintah No 14 tahun 2010 Tentang Pendidikan Kedinasan
- Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggiundang-undang Nomor
- Peraturan Pemerintah No 50 Tahun 2011 Tentang Rencana Induk Pembangunan Pariwisata Nasional
- Peraturan Pemerintah No 52 Tahun 2012 Tentang Sertifikasi Usaha Pariwisata dan Sertifikasi Kompetensi
- RI, K. (2009). No TitleUndang-undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan. Undang Undang No 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan, 57, 3.
- Said, F. (2011). Disertasi : Implementasi Kebijakan : Suatu Studi Kebijakan Wisata Bahari Di Sulawesi Selatan. Pasca Sarjana S3 Universitas Negeri
- Slamet, P. H. (2009). Peran pendidikan vokasi dalam pembangunan ekonomi. Cakrawala Pendidikan, xxx(2), 189–203.
http://scholar.google.co.id/scholar_url?url=http%3A%2F%2Fippmp.uny.ac.id%2Fsites%2Fippmp.uny.ac.id%2Ffiles%2F2%2520Slamet%2520PH.pdf&hl=id&sa=T&oi=gpp&ct=res&cd=0&d=12706274777225940229&ei=J-FIXouSJY3KyQTnwpngCQ&scisig=AAGBfm075Lkbr0IlsUHAp81RXaxXiHN5Rg&n
- Smith, B. K., & Larimier, W. C. (2009). The Public Policy Theory Primer. Westview Press. Makassar.
- Sudira, P. (2018). Metodologi Pembelajaran Vocational: Inovasi, Teori dan Praksis. In UNY Press.
- Tashakkori, A. (1377). Foundations of Mixed Methods Research_ Integrating Quantitative and Qualitative Approaches in the Social and Behavioral Sciences-Sage Publications.
- Thomas A. Dan Birkland. (2005). An Introduction to The Policy Process (theory, concept, and models of Public Policy Making. M.E. Sharpe New York.
- Undang-Undang RI No 10 tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan